PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)**

UNIT KERJA : **BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERLINA PRASETYOWATI SAMBODO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **924134**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 3.601.300.000

1. Tanah Seluas 2.057 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.057.000.000
2. Tanah Seluas 2.735 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 273.500.000
3. Tanah Seluas 772 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 154.400.000
4. Tanah Seluas 888 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 266.400.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 92.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HADIAH Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. LAINNYA, POLIGON MTB Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. LAINNYA, WIMCYCLE MTB Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 44.600.000

D. SURAT BERHARGA — Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS — Rp. 16.126.792

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.754.026.792**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**288.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.466.026.792**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.